

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, penjabaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar diatur melalui Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 124 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

DPKP sebagai lembaga teknis daerah dibentuk dengan tujuan menunjang Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, yang meliputi :

- Sub Urusan Perumahan, kewenangan kabupaten/kota mencakup (1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota. (2) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- Sub Urusan Kawasan Permukiman, kewenangan kabupaten/kota mencakup Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) ha.
- Sub Urusan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU), kewenangan kabupaten/kota mencakup penyelenggaraan PSU perumahan.
- Sub Urusan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, kewenangan kabupaten/kota mencakup sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang

melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil.

Permasalahan Strategis di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman meliputi Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni di Kabupaten Kepulauan Selayar, Masih rendahnya kawasan kumuh yang tertata, berdasarkan telaahan terhadap Renstra yaitu belum optimalnya Penyediaan Rumah Layak Huni bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota, Peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan infrastruktur kawasan permukiman yang layak, hal ini berkaitan dengan Visi : Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia pada Misi 1 Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan dan Misi 3 Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan Program yang mendukung pencapaian kedua Misi tersebut yaitu:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- b. Program Pengembangan Perumahan;
- c. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. Program Kawasan Permukiman;
- e. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
- f. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Terhadap Telaahan RTRW struktur ruang wilayah direncanakan pengembangannya dengan penataan pusat-pusat pemerintahan, pusat-pusat permukiman, pusat-pusat kegiatan industri, perdagangan barang dan jasa serta simpul transportasi yang ada di wilayah ini. Penatagunaan ruang yang berskala internal kabupaten/ kota diserahkan wewenang dan tanggung jawabnya kepada kabupaten/kota masing-masing, sehingga dapat dirumuskan Isu-Isu Strategis yaitu :

- Perlunya pengoptimalan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat rumah layak huni di perumahan dan kawasan permukiman,

- Perlunya pengoptimalan pemenuhan Prasana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) di perumahan dan kawasan permukiman,
- Adanya prioritas dan dukungan dalam penanganan kawasan permukiman secara terpadu.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan dinas perumahan dan kawasan permukiman kabupaten kepulauan selayar bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar akan berupaya melakukan percepatan pembangunan untuk mendorong pembangunan infrastruktur yang belum merata menyebabkan adanya kesenjangan antar wilayah di Kabupaten Kepulauan Selayar. Salah satu infrastruktur dasar masyarakat yang harus dipenuhi dengan layak adalah perumahan dan kawasan pemukiman.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyediaan infrastruktur perumahan mencakup antara lain belum optimalnya sistem data dan informasi perumahan dimana aplikasi yang digunakan saat ini dari pemerintah antara lain e-RTLH melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), aplikasi SIBARU untuk Sistem Informasi Usulan Bantuan Program Perumahan. Selain itu, permasalahan lainnya yaitu keterbatasan akses pembiayaan rumah untuk pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), masih adanya perumahan yang belum memiliki standar layak huni sesuai Keputusan Menteri Prasarana Wilayah Republik Indonesia Nomor 403 tahun 2002.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyediaan infrastruktur kawasan permukiman antara lain masih rendahnya kawasan kumuh yang tertata dan masih tingginya luasan permukiman kumuh kewenangan kabupaten/kota, belum optimalnya sistem data dan informasi kawasan permukiman, belum optimalnya pemenuhan layanan PSU seperti pengelolaan, jalan lingkungan dan drainase lingkungan di kawasan permukiman.

Permasalahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), dimana rumah atau tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia selain sandang dan pangan dimana kondisi rumah tinggal secara kasat mata akan memperlihatkan tingkat kesejahteraan penduduk. Salah satu prasyarat kondisi perumahan yang baik adalah apabila sanitasinya baik dan terstruktur. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Selayar belum mencukupi sehingga pembangunan infrastruktur harus diarahkan pada rumah tangga yang tidak menggunakan sanitasi yang layak karena sangat berpengaruh sekali dalam penurunan tingkat kesehatan di masyarakat. Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni di Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun permasalahan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Aspek	Permasalahan
1.	Permasalahan dalam Bidang Perumahan	1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi 2. Belum adanya ketersediaan lahan untuk relokasi 3. Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni di Kabupaten Kepulauan Selayar 4. Belum optimalnya sistem data dan informasi perumahan 5. Keterbatasan akses pembiayaan rumah untuk pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

No.	Aspek	Permasalahan
2.	Permasalahan dalam Bidang Kawasan Permukiman	1. Masih rendahnya kawasan kumuh yang tertata 2. Penetapan lokasi kawasan permukiman kumuh bukan menjadi kewenangan kabupaten/kota 3. Belum optimalnya sistem data dan informasi kawasan permukiman 4. Belum optimalnya pemenuhan layanan PSU seperti pengelolaan, jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi dan air limbah di kawasan permukiman.
3.	Permasalahan dalam bidang Prasarana Sarana Umum	1. Masih sulit dan terbatasnya pemenuhan air bersih di beberapa pulau di wilayah Kepulauan 2. Belum adanya database prasarana, sarana dan utilitas dalam rangka pencapaian tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terletak pada titik koordinat -5.90973,121.36036, yang beralamat di Jl. Kemiri No. 27 Telp. (0414) 21313 Benteng Kepulauan Selayar, Email : diperkimdpkp@gmail.com.



Visi dan Misi Kepala Daerah

Menelaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar dapat diuraikan sebagai berikut :

Visi

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Sehingga berdasarkan permasalahan dan isu strategis pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar yang berbasis pada sumberdaya maritim serta memperhatikan rumusan visi RPJMN 2020-2024, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 dan RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar 2005-2025 dengan visi “Selayar sebagai Kabupaten Maritim Terdepan, Mapan, Mandiri, dan Berkelanjutan” maka Visi pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk periode RPJMD 2021-2026 adalah sebagai berikut :

“Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim

Kawasan Timur Indonesia”

Rumusan Pemaknaan Visi :

- **Bandar Maritim** adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepelabuhanan yang memiliki kawasan khusus untuk melayani penumpang dan bongkar/muat barang, serta perdagangan barang, jasa dan industri.
- **Kawasan Indonesia Timur** : Berada pada Kawasan Timur Indonesia dengan jaringan (hub) perdagangan barang/jasa, industri, dan distribusi logistik yang mencakup kabupaten/ kota pada wilayah Teluk Bone, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah Bagian Timur, Maluku dan Maluku Utara.

Indikator utama yang hendak diwujudkan pada akhir periode RPJMD dengan visi Bandar Maritim ini adalah: 1. Kepulauan Selayar berperan

menjadi simpul transportasi laut nasional; 2. Pengelolaan sumberdaya alam yang optimal dengan keseimbangan lingkungan hidup yang terjamin; 3. Kepulauan Selayar menjadi penyuplai kebutuhan pangan nasional dari komoditas perikanan serta menjadi penyedia komoditas ekspor perikanan dan non perikanan; 4. Peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan daya saing daerah.

Bandar maritim didukung oleh 3 (tiga) pilar pembangunan, yaitu:

1. Kawasan Distribusi Logistik di Pammatata dan sekitarnya, ditopang oleh 5 (lima) sub-kawasan yakni:
 - a. Sub-kawasan utama pada Pelabuhan Benteng;
 - b. Sub-kawasan 2 (dua) pada kawasan pelabuhan Benteng-Jampea;
 - c. Sub-Kawasan 3 (tiga) pada Kawasan Pelabuhan Bonerate;
 - d. Sub-Kawasan 4 (empat) pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.
2. Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata di Pasi - Gusung, didukung oleh tujuh sub-kawasan yakni:
 - a. Sub-Kawasan 1 pada Kawasan Matalalang;
 - b. Sub-Kawasan 2 pada Kawasan Baloiya;
 - c. Sub-Kawasan 3 pada Kawasan Pantai Pinang;
 - d. Sub-Kawasan 4 pada Kawasan Pantai Bahuluang;
 - e. Sub-Kawasan 5 pada Kawasan Pantai Polassi;
 - f. Sub-Kawasan 6 pada Kawasan Pantai Kayuadi;
 - g. Sub-Kawasan 7 pada Kawasan Pantai Pulau Panjang.
3. Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) di Hangkoang, yang didukung oleh 5 (lima) sub-sentra:
 - a. Sub Sentra Utama pada Kawasan TPI Bonehalang;
Sub-Sentra 1 pada Kawasan Pelabuhan Kayuadi;
 - b. Sub-Sentra 2 pada Kawasan Pelabuhan Benteng-Jampea;
 - c. Sub-Sentra 3 pada Kawasan Pelabuhan Bonerate;
 - d. Sub-Sentra 4 pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.

Misi

Misi merupakan gambaran upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. misi Kepulauan Selayar disusun untuk memperjelas langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan Kepulauan Selayar sebagai **Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia**. Upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Kepulauan Selayar yang berbasis maritim meliputi :

1. Mengembangkan tatakelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan
2. Meningkatkan kualitas pembangunan perdesaan
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat
4. Mengembangkan pengelolaan potensi kelautan
5. Meningkatkan pembinaan kehidupan social dan keagamaan
6. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup

Dari keenam Misi Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut di atas, maka Misi Pertama, Kedua dan Ketiga yang terkait dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar. Misi Pertama, Kedua dan Ketiga tersebut dimaknai sebagai upaya untuk mewujudkan infrastruktur baik prasarana dan sarana yang berkualitas dan aksesibel serta merata dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dasar.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan pembangunan infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman. Keterkaitan antara Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Keterkaitan antara Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1. Mengembangkan tatakelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan	Mewujudkan Reformasi Birokrasi di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah	- Nilai Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Dinas Perkim - Laporan Keuangan Dinas Perkim sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) - Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Dinas Perkim (%)
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Meningkatkan Fasilitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	- Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) - Meningkatnya Pemenuhan PSU Perumahan	- Rasio Rumah Layak Huni - Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan PSU

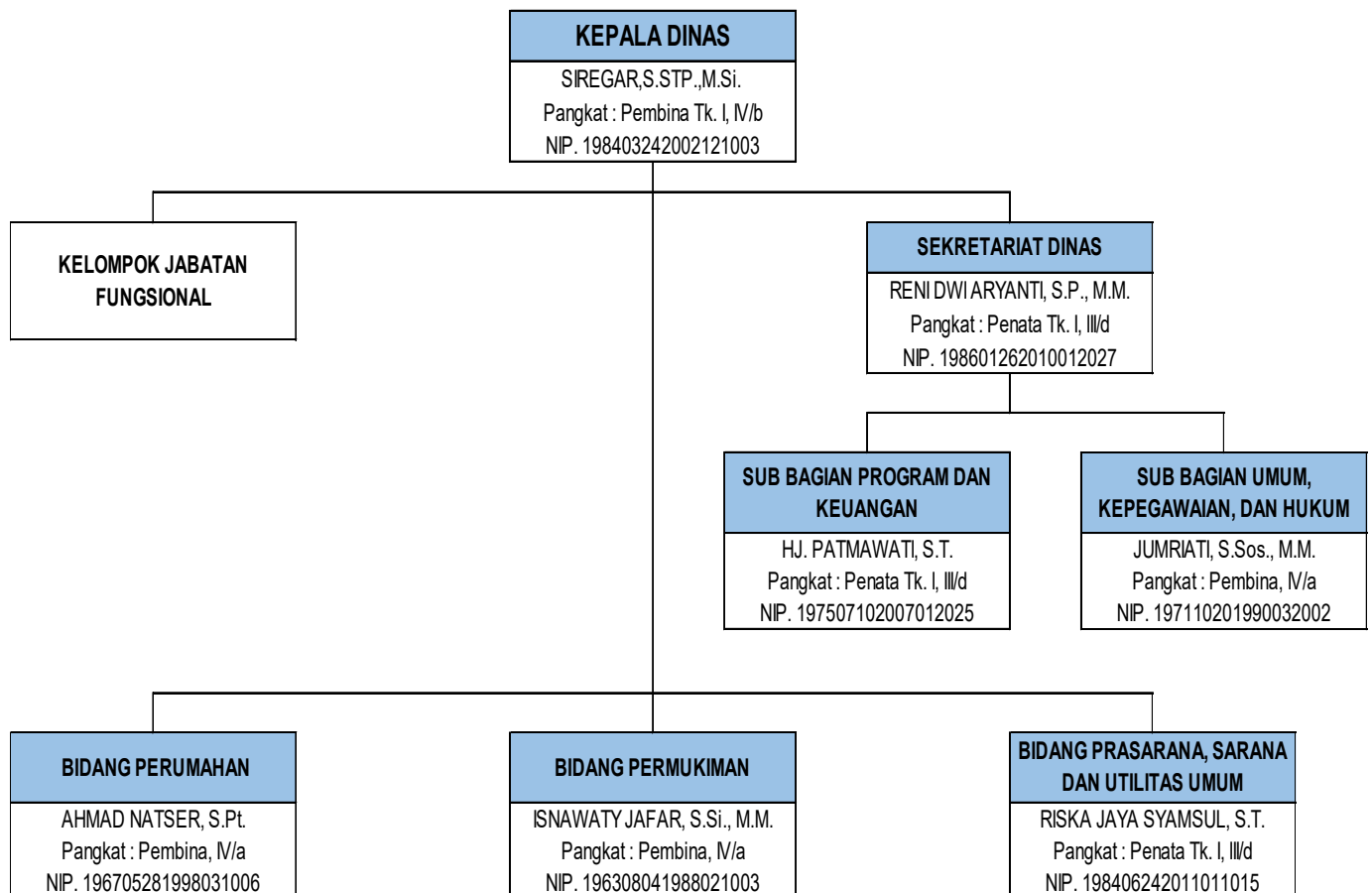
1.2. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 124 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, meliputi :
 1. Subbagian Program dan Keuangan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian

- c. Bidang Perumahan
- d. Bidang Permukiman
- e. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 60 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, mempunyai tugas Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perumahan, Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang kawasan permukiman,
- b. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU),
- c. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang verifikasi dan sertifikasi,
- d. Pelaksanaan administrasi dinas, dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsi.

1.3. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan data tahun 2024 sebanyak 25 orang. Berdasarkan Golongan jabatan pada satuan kerja ini lebih didominasi golongan III sebanyak 18 orang atau 72% dari total pegawai yang ada.

Sedangkan berdasarkan pendidikan terakhir lebih didominasi tingkat pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 18 orang atau dengan persentase 72%, setelah itu untuk tingkat pendidikan SMA berjumlah sebanyak 3 orang atau 12%, 4 orang untuk tingkat pendidikan Magister (S2) atau dengan

persentase 16% artinya memiliki potensi yang cukup besar untuk pemanfaatan SDM dalam menjalankan tupoksi masing-masing. Potensi SDM Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada Tabel 1.3 dan Tabel 1.4.

Tabel 1.3

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Golongan Jabatan
Berdasarkan Jenis Kelamin

Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
	P	L	
I	0	0	0
II	2	1	3
III	7	11	18
IV	2	2	4
Total	11 orang	14 orang	25 orang

Sumber : Subag Umum, Kepegawaian dan Hukum

Tabel 1.4

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah
SD	-
SLTP	-
SMA	3 orang
Diploma	-
S1	18 orang
S2	4 orang
Total	25 orang

Sumber : Subag Umum, Kepegawaian dan Hukum

BAB II**HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN****2.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan****2.1.1 Capaian Kinerja Berdasarkan Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

DPKP sebagai lembaga teknis daerah dibentuk dengan tujuan menunjang Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman. Rangkaian program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pada Tahun 2024 ini adalah bagian integral dalam mendukung pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dan merupakan suatu perjanjian kinerja antara Kepala SKPD dengan Bupati Kepulauan Selayar. Pada Tahun 2024 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp.8.880.475.900,- dengan rincian Belanja Operasi Rp.5.676.349.900,- dan Belanja Modal Rp.3.204.126.000,- selanjutnya melalui mekanisme perubahan APBD, anggaran keseluruhan berubah menjadi Rp.6.991.176.000,- dengan rincian Belanja Operasi Rp.3.762.445.000,- dan Belanja Modal Rp.3.228.731.000,-. Perubahan anggaran ini dilakukan dengan pertimbangan untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan. Dari total anggaran sebesar Rp.6.991.176.000,- anggaran yang terbelanjakan sebesar Rp.6.577.355.767,- dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp.413.372.833,- dengan realisasi keuangan sebanyak 94,08%.

Program dan Kegiatan dilaksanakan setiap tahun dengan penekanan prioritas kinerja sesuai dengan kebutuhan anggaran yang

telah direncanakan. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 melaksanakan program dan kegiatan yang mengacu pada RKPD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2024. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan 4 Program dan 13 Kegiatan dengan 36 sub kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100% Rp 3.200.029.000	94,05% Rp 3.009.537.967			
				<i>Kegiatan :</i>					
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100% Rp 15.441.800	82,84% Rp 12.792.200			
				- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	Terdapat selisih antara pagu anggaran dengan hasil negosiasi oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada belanja Alat Tulis Kantor		
					Rp 1.865.000	Rp 1.527.200			
				- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Terdapat selisih antara pagu anggaran dengan hasil negosiasi oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada belanja Alat Tulis Kantor		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp 3.712.800	Rp 3.072.800			
				- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Terdapat selisih antara pagu anggaran dengan hasil negosiasi oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada belanja Alat Tulis Kantor		
					Rp 2.364.000	Rp 1.935.300			
				- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Terdapat selisih antara pagu anggaran dengan hasil negosiasi oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada belanja Alat Tulis Kantor		
					Rp 5.000.000	Rp 4.204.300			
				- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan			
					Rp 2.500.000	Rp 2.052.600	Terdapat selisih antara pagu anggaran dengan hasil negosiasi oleh Pejabat Pengadaan		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							Barang/Jasa pada belanja Alat Tulis Kantor		
				Kegiatan :					
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	93,58 %			
					Rp 2.349.890.000	Rp 2.199.128.924			
				- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang	25 Orang			
					Rp 2.342.050.000	Rp 2.192.664.524			
				- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Terdapat selisih antara pagu anggaran dengan hasil negosiasi oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada belanja Alat Tulis Kantor		
					Rp 3.980.000	Rp 3.274.700			
				- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Terdapat selisih antara pagu anggaran dengan hasil negosiasi oleh Pejabat Pengadaan		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							Barang/Jasa pada belanja Alat Tulis Kantor		
					Rp 1.250.000	Rp 1.058.700			
				- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	Terdapat selisih antara pagu anggaran dengan hasil negosiasi oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada belanja Alat Tulis Kantor		
					Rp 1.317.000	Rp 1.069.000			
				- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Terdapat selisih antara pagu anggaran dengan hasil negosiasi oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada belanja Alat Tulis Kantor		
					Rp 1.293.000	Rp 1.062.000			
				- Penyusunan Pelaporan dan	12 Laporan	12 Laporan	Anggaran di pindahkan ke Sub kegiatan		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
					-	-			
				Kegiatan :					
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	80,35%			
					Rp 3.000.000	Rp 2.410.400			
				- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Terdapat selisih antara pagu anggaran dengan hasil negosiasi oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada belanja Alat Tulis Kantor		
					Rp 3.000.000	Rp 2.410.400			
				Kegiatan :					

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	85,00%			
					Rp 15.000.000	Rp 12.750.000			
				- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Laporan	1 Laporan			
					Rp 15.000.000	Rp 12.750.000	Biaya kontribusi tidak sesuai dengan harga SIPD		
				Kegiatan :					
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	97,28 %			
					Rp 332.395.200	Rp 323.348.514			
				- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	Terdapat selisih antara pagu anggaran dengan hasil negosiasi oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa		
					Rp 2.002.400	Rp 1.734.000			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMEN DASI DPRD
				- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	1 Paket	Kegiatan pelaksanaan rapat koordinasi		
					Rp 24.633.000	Rp 23.967.000			
				- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket	Terdapat selisih antara pagu anggaran dengan hasil negosiasi oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa		
					Rp 8.192.900	Rp 7.094.800			
				- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 Dokumen	1 Dokumen			
					Rp 1.500.000	Rp 1.500.000			
				- Penyediaan Bahan/Material	1 Paket	1 Paket	Terdapat selisih antara pagu anggaran dengan hasil negosiasi oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp 43.820.900	Rp 36.996.000			
				- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan			
					Rp 252.246.000	Rp. 252.056.714			
				Kegiatan :					
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	93,88 %			
					Rp 296.962.000	Rp 278.782.069			
				- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	1 Laporan	Sesuai tagihan Listrik, Air dan Wifi		
					Rp 101.332.000	Rp 89.640.869			
				- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	1 Laporan	Terdapat pegawai Harian Lepas yang tidak terdata pada pendataan BKN		
					Rp 195.630.000	Rp 189.141.200			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Kegiatan :					
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	96,26 %			
					Rp 187.340.000	Rp 180.325.860			
				- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21 Unit	18 Unit	Pembayaran Pajak kendaraan (STNK) disesuaikan dengan tagihan		
					Rp 141.140.000	Rp 134.225.860			
				- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40 Jenis	4 Jenis			
					Rp 16.200.000	Rp 16.100.000			
				- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	1 Unit	1 Unit			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN		TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					Lainnya					
						Rp 30.000.000	Rp 30.000.000			
				Program Pengembangan Perumahan		100%	96,05%			
						Rp 109.741.000	Rp 105.409.700			
				Kegiatan :						
				Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		100%	96,05 %			
						Rp 109.741.000	Rp 105.409.700			
				-	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dokumen	1 Dokumen	Terdapat selisih antara pagu anggaran dengan hasil negosiasi oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada belanja Alat Tulis Kantor dan belanja perjalanan dinas untuk uang penginapan yang tidak		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							digunakan sesuai Standar biaya Hotel (30%)		
					Rp 30.000.000	Rp 28.338.700			
				- Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	1 Dokumen	1 Dokumen	Terdapat selisih antara pagu anggaran dengan hasil negosiasi oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada belanja Alat Tulis Kantor dan belanja perjalanan dinas untuk uang penginapan yang tidak digunakan sesuai Standar biaya Hotel (30%)		
					Rp 15.000.000	Rp 14.000.600			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				- Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Kesalahan pemilihan Nomenklatur di SIPD		
					-	-			
				- Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Terdapat selisih antara pagu anggaran dengan hasil negosiasi oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada belanja Alat Tulis Kantor		
					Rp 18.653.000	Rp 18.110.600			
				- Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Susun	1 Dokumen	1 Dokumen	Terdapat selisih antara pagu anggaran dengan hasil negosiasi oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada belanja Alat Tulis Kantor		
					Rp 46.088.000	Rp 44.959.800			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Program Kawasan Permukiman	100%	95,98%			
					Rp 118.640.000	Rp 113.867.600			
				Kegiatan :					
				Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	100%	98,66%			
					Rp 44.410.000	Rp 43.814.200			
				- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1 Laporan	1 Laporan	Terdapat selisih antara pagu anggaran dengan hasil negosiasi oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada belanja Alat Tulis Kantor		
					Rp 44.410.000	Rp 43.814.200			
				Kegiatan :					
				Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	100%	84,50%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Kumuh dengan luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Rp 24.230.000	Rp 20.473.800			
				- Pembentukan/Pe mbinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	1 Laporan	1 Laporan	Pembuatan akte notaris yang tidak lagi pada kantor notaris sehingga anggaran tidak mencukupi.		
					Rp 10.990.000	Rp 7.727.500			
				- Penyusunan/Revi ew/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	1 Dokumen	1 Dokumen	Terdapat selisih antara pagu anggaran dengan hasil negosiasi oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada belanja Alat Tulis Kantor		
					Rp 13.240.000	Rp 12.746.300			
				Kegiatan :					
				Peningkatan Kualitas	100%	99,16%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMEN DASI DPRD
				Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	Rp 50.000.000	Rp 49.579.600			
				- Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1 Laporan	1 Laporan			
					Rp 50.000.000	Rp 49.579.600	Terdapat selisih antara pagu anggaran dengan hasil negosiasi oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada belanja Alat Tulis Kantor		
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	100%	93,99%			
					Rp 3.562.766.000	Rp 3.348.540.500			
				Kegiatan :					
				Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	100%	93,84%			
					Rp 3.562.766.000	Rp 3.348.540.500			
				- Perencanaan Penyediaan PSU	1 Dokumen	1 Dokumen	Pemasangan lampu taman dan upah		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Perumahan			penggali kuburan belum selesai terlaksana		
					Rp 102.400.000	Rp 90.327.900			
			-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	29 Lokasi	29 Lokasi	Retensi kegiatan tahun 2024		
					Rp 3.396.726.000	Rp 3.195.058.800			
			-	Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1 Laporan	1 Laporan	Terdapat selisih antara pagu anggaran dengan hasil negosiasi oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada belanja Alat Tulis Kantor		
					Rp 63.640.000	Rp 63.153.800			
TOTAL					Rp 6.991.176.000	Rp 6.577.355.767			

2.1.2. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KETERANGAN
1.	Persentase penurunan luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha (%)	%	4,22	6,32%	6,32%	
2.	Persentase berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) (%)	%	8,14	4,42%	4,42%	
3.	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)	%	3,42	1,84%	1,84%	
4.	Persentase rekomendasi pengusulan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi pengembang yang diterbitkan (%)	%	100	-	-	Tidak adanya pengembang yang memenuhi kriteria untuk penerbitan sertifikat sebagai acuan permintaan bantuan PSU Perumahan
5.	Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	%	100	100%	100%	

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KETERANGAN
6.	Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (%)	%	100	100%	100%	

2.1.3. CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN URUSAN

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 tidak mengelola program dan kegiatan berdasarkan urusan.

2.1.4. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

No.	Urusan Pemerintahan Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)
1	2	3	4	5=4-3	6=(4/3)*100	7	8	9	10
1	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman								
	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp. 6.991.176.000	Rp. 6.577.355.767	Rp. 413.372.833	94,08	4	95,02	12	91,78

2.1.5. INOVASI

NO.	URAIAN INOVASI	MAKSUD DAN TUJUAN INOVASI	HASIL/ MANFAAT	KET.
1	2	3	4	5

NO.	URAIAN INOVASI	MAKSUD DAN TUJUAN INOVASI	HASIL/ MANFAAT	KET.
1	2	3	4	5
1.	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

2.1.6. PRESTASI/PENGHARGAAN

No.	Nama Penghargaan	Tingkat				Diselenggarakan oleh/ Penyelenggara	Ket.
		Internasional	Nasional	Provinsi	Kabupaten		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Piagam/Penghargaan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar memberikan Penghargaan Kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Atas Pengelolaan Keuangan yang Berkualitas Diberikan pada Rapat Gelar				√	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar	

No.	Nama Penghargaan	Tingkat				Diselenggarakan oleh/ Penyelenggara	Ket.
		Internasional	Nasional	Provinsi	Kabupaten		
	Pengawasan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022						
2.	Piagam Penghargaan Gelar Pengawasan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Kategori “Inisiasi dalam Manajemen Risiko”				√	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar	

2.2. KEBIJAKAN DAERAH (PERDA, PERBUP, DAN KEPUTUSAN BUPATI) YANG DIINISIASI OLEH PERANGKAT DAERAH)

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum		Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	Ket.
		Nomor/Tanggal Pengesahan	Tentang		
1	2	3	4	5	6
1	Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Nomor 560/XI/TAHUN 2024	Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Perbaikan rumah tidak layak huni pada kawasan permukiman kumuh dibawah Sepuluh Hektar	

2.3. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1.	NIHIL	NIHIL	NIHIL

BAB III
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS
PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

3.1. Tugas Pembantuan dan Penugasan Yang Dilaksanakan (NIHIL)

3.2. Hambatan-Hambatan (NIHIL)

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak mengelola tugas pembantuan.

BAB IV**PENUTUP**

Secara umum, Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2024 di Kabupaten Kepulauan Selayar khususnya pada bidang perumahan dan kawasan permukiman dapat diselenggarakan dengan optimal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada tanpa mengabaikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kondisi tersebut juga sangat ditopang oleh kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.

Capaian kinerja tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang dijelaskan dalam Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban ini, sesungguhnya merupakan kinerja segenap komponen yang ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar, yang telah melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing dalam rangka mendukung Selayar sebagai Kabupaten Kepulauan Maritim yang sejahtera berbasis nilai keagamaan dan budaya.

Meskipun Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat diselenggarakan secara optimal berdasarkan indikasi pencapaian sasaran program dan kegiatan oleh segenap Instansi/Unit Kerja yang ada dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, namun disadari bahwa masih terdapat perbedaan dengan kondisi yang diharapkan masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh kondisi keterbatasan, permasalahan dan hambatan yang melingkupi.

Dengan mengacu pada kondisi permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024, maka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada tahun-tahun berikutnya akan terus dilakukan penyempurnaan dan perbaikan, khususnya dalam memenuhi harapan masyarakat.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 ini disusun sebagai suatu kewajiban konstitusional dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sekian dan Terima Kasih
Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Benteng, 24 Januari 2025

**KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR,**

SIREGAR, S.STP., M.Si.
Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19840324 200212 1 003